

Pemprov Raih WTP Pertama dari BPK



CINDERAMATA: Wakil Ketua BPK-RI, Sapto Amal Damandari menyerahkan cinderamata kepada Gubernur Maluku, Saïd Assagaf didampingi Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae usai menandatangani berita acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di kantor DPRD Maluku, Jumat (10/6).

RUZADY ADJIS/KABAR TIMUR

AMBON-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan

Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015. Ini predikat pertama dari lembaga pemeriksa keuangan itu. "WTP ini merupakan capaian opini tertinggi yang pertama kali diraih Pemprov Maluku atas

LKPD, karena selama ini hanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," kata Wakil Ketua BPK Sapto Amal Daman

▶ Berlanjut ke Hal...7

Pemprov Raih WTP Pertama dari BPK

Lanjutan Hal 1

dari dalam sidang Paripurna Istimewa DPRD Maluku, Jumat (10/6).

Sidang paripurna istimewa itu dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI kepada DPRD Maluku yang diserahkan langsung Sapto kepada Ketua DPRD Maluku Edwin Huwae dan disaksikan Gubernur Maluku Said Assagaff.

"BPK menyimpulkan opini atau laporan keuangan Pemrov Maluku tahun anggaran 2015 adalah wajar tanpa pengecualian," kata Sapto dalam sambutannya yang disambut tepuk tangan Gubernur, Wakil Gubernur Zeth Sahuburua, Ketua DPRD, anggota DPRD dan pejabat Pemprov Maluku yang mengikuti paripurna itu.

Opini WTP ini, menurut Sapto, baru pertama kali diperoleh Pemprov Maluku. Karena selama ini laporan keuangan Pemprov Maluku hanya mendapat opini WDP. Meski mendapat opini WTP, namun ada sejumlah rekomendasi dan catatan dari BPK RI kepada Pemprov Maluku.

Diantaranya, memberikan rekomendasi kepada Gubernur agar memerintahkan Sekda, kepala dinas dan badan di lingkup Pemprov Maluku agar mengelola dan penataan aset-aset milik Pemprov Maluku secara baik.

"Memerintahkan Sekda Maluku agar menginventaris aset bank yang nilainya mencapai Rp 1,98 miliar. Selain itu, BPK juga minta Pemprov meminta laporan pertanggungjawaban dari penerima dana hibab sebesar Rp 1,33 miliar," jelasnya.

Namun, menurut Sapto, catatan tersebut secara material tidak memiliki pengaruh atas laporan keuangan Pemprov Maluku. Sapto juga menyatakan, setelah ini Pemprov Maluku

harus menindaklanjuti laporan BPK tersebut paling lambat enam bulan.

Hal yang sama juga dilakukan DPRD Maluku. "Kami juga minta Pemprov Maluku terus meningkatkan kualitas laporan keuangan. DPRD Maluku juga sesuai kewenangannya dapat mengawasi laporan keuangan Pemprov Maluku itu," katanya.

Gubernur Maluku, Said Assagaff menyatakan, dirinya sudah memiliki firasat baik kalau tahun 2016 ini, Pemprov mendapatkan opini WTP atas LKPD tahun 2015. Ia menyatakan, selama ini pihaknya mengharuskan para pejabat untuk mengelola dan menggunakan keuangan daerah secara baik dan tepat.

Upaya pengawasan juga terus dilakukan untuk mencegah penyimpangan. Opini WTP ini menurut gubernur menunjukan aparatur Pemrov Maluku bekerja maksimal dalam mengelola dan menggunakan keuangan daerah.

"Terhadap LKPD kami terus bekerja keras, dan upaya maksimal untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap pengelolaan keuangan daerah baik secara administratif maupun fisik, sehingga upaya tersebut hari ini membuahkan hasil. Bahwa untuk pertama kalinya, Pemrov Maluku mendapatkan opini WTP," kata Gubernur, yang berharap opini WTP juga diraih kabupaten dan kota di Maluku. Ia menyatakan, sukses atas opini WTP ini merupakan sukses bersama untuk mensejahterakan masyarakat Maluku.

Ketua DPRD Maluku Edwin Huwae menyatakan, WTP ini merupakan capaian opini tertinggi yang diraih Pemprov Maluku. Karena menurutnya, sejak 2013 hingga 2014, LKPD hanya memperoleh opini WDP dari BPK RI.

Ia menyatakan, capaian WTP ini merupakan langkah-langkah penting dan strategis

seluruh pemangku kepentingan di Maluku, dalam rangka memantapkan komitmen aparatur dan meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

"Selanjutnya hasil pemeriksaan BPK atas LKPD 2015 akan ditindaklanjuti melalui pembahasan antara DPRD dengan pemerintah daerah secara bersama sesuai aturan yang berlaku," kata Edwin.

Disebutkan, pemberian opini WTP dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Maluku tahun anggaran 2015, tidak dilihat sebagai sebuah prestasi administrasi yang normatif semata.

"Prestasi ini perlu dimaknai sebagai sebuah penghargaan atas komitmen, integritas, profesionalitas dan transparansi tata kelola pemerintahan dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara baik dan benar," terangnya.

Menurut Edwin, DPRD bersama pemprov memiliki keyakinan yang sama bahwa yang dilakukan saat ini merupakan perwujudan tanggung jawab bersama melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tetap mempertahankan opini WTP yang sudah dicapai lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang.

DPRD bersama Pemprov Maluku juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan BPK serta perwakilannya di Maluku bersama staf yang telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemda tahun anggaran 2015.

"Kiranya lewat fungsi dan peran yang dimiliki BPK RI, seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pengelolaan keuangan dapat berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Edwin.

(MG1/KAF/KTM)